

NUANSA POLITISASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS GURU SEBAGAI DAMPAK DARI DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Afriantoni

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Fatah Palembang

E-mail : imrariantoni@gmail.com

Abstract

Education Decentralization is a fact that cannot be denied in the national system of education. Therefore, educational settings are vulnerable towards political policy played by the government that makes the government have a very dominant authority in determining the direction of education including teacher's duty. As educators, the teachers should have professional competence, pedagogic, personality, social that can make them professional teachers. Therefore, politicizing tendency is not expected to interfere with the professional duties of teachers. As a consequence, the strategies that lead to improve the quality and welfare of teachers are necessarily needed.

Keywords: *Politicization, Teacher, Education decentralization*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sebelum era reformasi penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana bukan pada proses pendidikan yang meliputi pengambil keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas eksistensi pendidikan. Hal ini bertolak belakang dari

kesadaran penentu kebijakan bahwa sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia. Selain itu, fenomena krisis yang melanda bangsa kita menunjukkan bahwa pendidikan dianggap belum berhasil dalam menyiapkan SDM yang unggul, kompetitif, dan beriman.

Setelah diterapkannya, otonomi daerah dengan memberlakukan desentralisasi pendidikan, maka dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional terjadi perubahan mendasar dan sangat signifikan sehingga mengharuskan pendidikan berjalan sesuai kaidah otonomi daerah. Oleh karena itu, sangat tepat jika dilaksanakan perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik.

Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan ke pemerintah daerah otonom dilakukan dalam berbagai bidang atau urusan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Selain dari pada itu salah satu dampak yang cukup menjadi pusat perhatian yakni tugas keguruan. Pasca dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdapat politisasi pemerintah terhadap pelaksanaan tugas guru, karena terkait tunjangan sertifikasi.

Dengan adanya desentralisasi diharapkan kue pembangunan akan terbagi rata dan pengawasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah akan lebih efektif, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ada dua konsep penting dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yakni manajemen berbasis sekolah, otonomi sekolah dan peningkatan mutu guru. Guru sebagai pendidik seyogyanya guru harus memiliki kompetensi meliputi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial sehingga dapat dikatakan guru profesional. Karena itu, jangan sampai kecenderungan nuansa politisasi jangan sampai mengganggu tugas guru profesional, untuk itu diperlukan strategi-strategi yang mengarah peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

2. *Pokok Masalah dan Persoalan*

Dengan latar belakang di atas penulis memfokuskan pada suatu obyek yang disebut pokok masalah dan persoalan tentang adanya nuansa politisasi terhadap tugas keguruan, sebab bila tidak difokuskan akan menarik banyak sekali masalah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Secara kasat mata dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan kuatnya nuasan politik dalam mengimplementasikan tugas-tugas keguruan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai dampak desentralisasi pendidikan. Karenanya, rumusan masalah pada kajian ini pada dasarnya ialah “Bagaimana suasana nuansa politik dalam pelaksanaan tugas guru sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan?”. Pokok masalah ini kemudian diuraikan menjadi tiga masalah sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud tugas keguruan ?
- b. Bagaimana kondisi nuansa politisasi dalam pelaksanaan tugas guru sebagai dampak desentralisasi pendidikan ?
- c. Strategi apa yang dapat digunakan untuk meminimalisasi upaya politisasi dalam pelaksanaan tugas guru sebagai dampak desentralisasi pendidikan ?

B. Pengertian Guru dan Desentralisasi

1. *Pengertian Guru*

Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikkan dengan guru, yang mempunyai makna “Digugu dan ditiru” artinya mereka yang selalu dicontoh dan dipanuti. Ahmad Tafsir (1992: 74-75) mengemukakan pendapat bahwa guru ialah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Menurut Ngalim Purwanto (1994: 126) bahwa guru ialah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang.

Pengertian-pengertian diatas menurut Muhibbin Syah (1995: 233) masih bersifat umum, dan oleh karenanya dapat mengundang bermacam-macam interpretasi dan bahkan juga konotasi (arti lain). Pertama adalah kata “seorang (*A Person*) bisa mengacu pada siapa saja asal pekerjaan sehari-harinya (profesinya) mengajar. Dalam hal ini berarti bukan hanya dia yang sehari-harinya mengajar disekolah yang dapat disebut guru, melainkan juga dia-dia yang lainnya yang berprofesi (berposisi) sebsagai Kyai di pesantren, pendeta di gereja, instruktur di balai pendidikan dan pelatihan, kedua adalah kata “mengajar” dapat pula ditafsirkan bermacam-macam misalnya:

- a. Menularkan (menyampaikan) pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain (bersifat kognitif)
- b. Melaih keterampilan jasmani kepada orang lain (psikomotorik)
- c. Menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (afektif).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil sebuah konklusi bahwa yang dimaksud guru adalah seorang atau mereka yang pekerjaannya khusus menyampaikan (mengajarkan) materi pelajaran kepada siswa di sekolah.

2. *Tugas dan Fungsi Guru*

Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat yang juga memiliki beberapa tugas menurut Rostiyah (2000: 36) mengemukakan bahwa fungsi dan tugas guru profesional adalah :

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila
- c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. 2 Tahun 1983
- d. Sebagai prantara dalam belajar

- e. Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut kehendak hatinya
- f. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat
- g. Sebagai penegak disiplin. Guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan apabila guru menjalaninya terlebih dahulu
- h. Sebagai administrator dan manajer. Guru sebagai perencana kurikulum
- i. Guru sebagai pemimpin
- j. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak

Sebagai pendidik guru harus berlaku membimbing dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah yang baik dan mengarahkan perkembangan anak didik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, termasuk dalam hal ini yang terpenting ikut memecahkan persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak didik. Dengan demikian diharapkan menciptakan perkembangan yang lebih baik pada diri siswa, baik perkembangan fisik maupun mental.

Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar dan pendidik dan sebagai pegawai. Yang paling utama adalah kedudukannya sebagai pengajar dan pendidik yakni sebagai guru. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru ia harus menunjukkan kelakuan yang layak bagi guru menurut harapan masyarakat. Apa yang dituntut dari guru dalam aspek etis, intelektual dan sosial lebih tinggi dari pada yang dituntut dari orang dewasa lainnya. Guru sebagai pendidik dan pembina generasi muda harus menjadi teladan di dalam maupun di luar sekolah. Guru harus senantiasa sadar akan kedudukannya selama 24 jam sehari. Di mana dan kapan saja ia akan selalu dipandang sebagai guru yang harus memperhatikan kelakuan yang dapat ditiru oleh masyarakat, khususnya oleh anak didik (Nasution, 2010: 91).

Dari uraian di atas secara rinci disimpulkan bahwa peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitator. Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar mengajar
- b. Motivator. Sebagai motivator guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar
- c. Informator. Sebagai informator guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum
- d. Pembimbing. Peran guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah disebutkan di atas adalah sebagai pembimbing
- e. Korektor. Sebagai korektor guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan buruk
- f. Inspirator. Sebagai inspirator guru harus dapat membedakan ilham yang baik bagi kemajuan anak didik
- g. Organisator. Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan oleh guru dalam bidang ini memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik dan lain sebagainya
- h. Inisator. Sebagai inisiator guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dan pendidikan dalam pengajaran
- i. Demonstrator. Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran anak didik pahami
- j. Pengelolaan kelas. Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat terhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru
- k. Mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya baik media non material maupun material

- l. Supervisor. Guru hendaknya dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran
- m. Evaluator. Guru dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek intrinsik dan ekstrinsik

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam proses belajar-mengajar, guru tidak hanya tampil lagi sebagai pengajar (*teacher*), seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih, pembimbing, dan manager belajar, juga yang lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi dari peran guru masa depan. Di mana sebagai pelatih, seorang guru akan berperan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya.

Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran, masih tetap memegang peranan penting. Peranan guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder ataupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem, nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang diharapkan merupakan hasil dari proses pengajaran, tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Di sinilah kelebihan manusia dalam hal ini guru dari alat-alat atau teknologi yang diciptakan manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya.

3. *Pengertian Desentralisasi Pendidikan*

Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi. Adapun sentralisasi dapat didefinisikan sebagai pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi (<http://istanailmu.com/desentralisasi-pendidikan/html>).

Bryant dan White memberi pengertian tentang desentralisasi lebih menekankan kepada konsekuensi dari penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan dan pengendalian tugas-tugas ketatanegaraan oleh badan-badan otonom daerah dalam rangka pemberdayaan (*empowerment*) potensi lokal. Desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan fasilitas local (Yoyon, 2011: 68).

Sistem desentralisasi juga berlaku di dunia pendidikan. Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan (Uno, 2008: 35).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka segala hal yang berhubungan dengan manajemen pendidikan dapat dikelola dan dilaksanakan oleh tingkat daerah sampai kepada masyarakat. Desentralisasi pendidikan juga berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputus dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah atau pemerintah daerah, atau masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bisa memberdayakan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah.

4. *Tujuan Desentralisasi Pendidikan*

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu:

- a. Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik)

- b. Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah

Adapun tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*school resources*; dana pendidikan yang berasal yang pemerintah dan masyarakat) (Armida, 2000, 2).

Desentralisasi pendidikan juga bertujuan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholders di daerah, untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara terus menerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan pencapaian murid. Selain itu, desentralisasi tersebut juga dalam rangka memberi kesempatan kepada rakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Desentralisasi pun mendorong terjadinya efisiensi manajemen pendidikan, karena sebagian besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah. Dengan wewenang yang besar dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah daerah pun terdorong untuk menggali berbagai potensi daerah dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu membiayai

pembangunan pendidikan di daerahnya. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan jika manajemen pendidikan di daerah atau sekolah dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat (Agus: <http://agusputraas.blogspot.com>)

Jadi, desentralisasi pendidikan merupakan peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat ini.

C. Nuansa Politisasi dan Tugas Keguruan di Era Desentralisasi Pendidikan

Sebagaimana paradigma sentralisasi, paradigma desentralisasi juga membawa dampak positif dan negatif terhadap dunia pendidikan. Burki menegaskan bahwa desentralisasi mendorong berkembangnya proses seleksi yang kompetitif dalam pengangkatan guru dan kepala sekolah. Menurut mereka guru-guru yang baik biasanya memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan pembelajaran. Burki menambahkan desentralisasi dapat memfasilitasi dan memperkuat fokus guru-guru pada kegiatan belajar siswa dengan cara menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam menilai problematika belajar, memberikan pilihan pedagogi yang tepat untuk sekolah, dan mengalokasikan sumber daya ke sekolah-sekolah yang memiliki kebutuhan khusus (Sirozi, 2010: 239).

Akan tetapi di pihak lain, desentralisasi dapat menciptakan ketidaksetaraan antar sekolah dan antar daerah. Pada tingkat lokal desentralisasi dapat melahirkan banyak pilihan bagi sekolah dan orang tua, memperbanyak ragam sumber pendanaan, dan memperbesar akses

terhadap informasi sehingga pada gilirannya akan dapat melahirkan beragam metode, kriteria, pilihan-pilihan, keragaman ini akan menimbulkan ketidaksetaraan antar sekolah dan antar daerah (Sirozi, 2010: 239).

1. Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru

Dalam rangka memperoleh profesionalisme guru, hal yang diujikan dalam sertifikasi adalah kompetensi guru. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 dan Peraturan Pemerintahan Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, kompetensi guru meliputi empat komponen melalui kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Namun demikian, setelah adanya sertifikasi pendidik, kinerja guru masih dirsa kurang meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dkk, di SMP Negeri I Lubuk Linggau menunjukkan bahwa dampak sertifikasi terhadap kinerja guru belum mengalami perubahan. Para pendidik di sekolahan tersebut belum mampu mengaplikasikan empat komponen tentang standar nasional pendidikan. Dampak sertifikasi pada komponen yang pertama yaitu pada kompetensi peadagogik, para guru belum mengalami perubahan yang lebih baik dalam memberikan pelajaran pada siswanya. Pemberian teori belajar dan penggunaan bahasa indonesia yang baikpun belum mampu sepenuhnya dilakukan oleh para guru juga belum mengalami peningkatan setelah adanya sertifikasi. Para guru belum mampu mengadakan efektifitas belajar siswa dan juga belum ada peningkatan dari guru untuk lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam bidangnya seperti diklat, Lokakarya, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Komponen yang ketiga, yaitu komponen kompetensi sosial guru, dalam komponen ini guru dituntut untuk meningkatkan rasa sosialnya seperti untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat agar berperan setara dalam pendidikan putra-putrinya. Komponen yang keempat adalah komponen kompetensi kepribadian guru, pada

komponen ini guru juga belum mengalami peningkatan yang signifikan untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional. Selain itu, guru belum bisa bersikap wajar dalam hal berpakaian dan memakai perhiasan yang mencolok.

Kinerja guru dinilai meningkat hanya saat guru-guru belum lolos sertifikasi dan setelah mendapatkan sertifikasi kinerja guru menjadi menurun seperti para guru menjadi enggan untuk mengikuti seminar atau pelatihan untuk peningkatan kualitas diri, padahal sebelum mendapat sertifikasi para guru menjadi lebih sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengenai dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Setelah mengelola data 16 dari 28 provinsi yang diteliti hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kinerja yang diharapkan dari guru yang sudah bersertifikasi, seperti perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran, atau peningkatan diri, dinilai masih tetap sama (Mulyono: www.pdfqueen.com.)

2. *Politisasi Dalam Pelaksanaan Tugas Guru*

Terlepas dari sikap keberpihakan kalangan guru pegawai negeri terhadap masalah kebijakan tambang, atau pun pada sikap loyalitasnya kepada pemerintah dan rasa solidaritas terhadap sesama guru pegawai negeri yang rumahnya menjadi sasaran korban dari amuk massa ketika berunjuk rasa menolak tambang. Tetapi pada posisi profesi guru yang kerap dipolitisasi serta netralitasnya sebagai pelayan masyarakat di bidang pendidikan. Masalah netralitas dan profesionalisme guru menjadi perhatian utama karena di tangan gurulah salah satu pemegang kunci kualitas pendidikan ditentukan. Berbagai perbaikan pun diupayakan pemerintah dengan mengharuskan guru memiliki sertifikat sebagai guru profesional, salah satunya melalui program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dan sertifikasi guru (Suara NTB: www.suarantb.com).

Kompleksnya persoalan guru ini ternyata bukan hanya pada persoalan profesionalitas dan kesejahteraan, tetapi juga pada persoalan penempatan dan distribusi guru yang tidak berimbang antara jumlah guru yang mengajar di wilayah perkotaan dan di wilayah pinggiran atau pedesaan. Masalah ketimpangan jumlah guru ini dituding sebagai implikasi dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Sehingga guru merupakan hak milik pemerintah kabupaten dan kota yang tak bisa sembarangan dipindah-tempatkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan rasionalisasi kebutuhan guru di setiap sekolah.

Kondisi guru yang merupakan milik daerah ini menyebabkan guru rawan terhadap praktek politisasi akibat adanya kebijakan dan dinamika politik. Kesenambungan karier guru dan kepala sekolah sangat tergantung pada faktor hubungan kedekatan dengan pejabat pemerintah lokal. Atas realitas ini, menjadi suatu dorongan dan alasan bagi Kemendikbud untuk mengembalikan kewenangan guru kepada pemerintah pusat. Selain adanya faktor fakta perencanaan dan desain kurikulum, gaji guru, bantuan operasional sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, dan buku pelajaran juga ditetapkan oleh pemerintah pusat (Suara NTB: www.suarantb.com).

3. *Kebijakan Atas Politisasi di tengah Desentralisasi Pendidikan*

Berdasarkan pengalaman, kegagalan implementasi sentralisasi pendidikan desentralisasi diakibatkan oleh beberapa hal berikut: 1) masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara radikal dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa; 2) kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah; 3) kemampuan keuangan daerah yang terbatas; 4) sumber daya manusia yang belum memadai; 5) kapasitas manajemen daerah yang belum memadai; 6) restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang; dan 7) pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Pelaksanaan disentralisasi pendidikan yang tidak matang juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya:

- a. Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, antar sekolah, antar individu warga masyarakat
- b. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreativitas tenaga kependidikan disekolah untuk melakukan pembaharuan
- c. Biaya administrasi disekolah meningkat karena prioritas anggaran di alokasikan untuyk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru di distribusikan ke sekolah
- d. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan pendidikan, secara kumulatif berpotensi akan menurunkan pendidikan
- e. Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahan dan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan
- f. Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda, mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.
- g. Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah

Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut di atas, desentralisasi pendidikan harus di laksanakan secara hati-hati dan dengan strategi yang tepat. Beberapa hal yang perlu lebih di perhatikan oleh para pemegang kebijakan antara lain:

- a. Adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa
- b. Masa transisi benar-benar di gunakan untuk menyiapkan berbagai hal yang dilakukan secara gradual dan di jadwalkan setepat mungkin
- c. Adanya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan

- d. Adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah di persiapkan dengan matang oleh daerah
- e. Pemahaman pemerintah daerah maupun DPRD terhadap keunikan dan keberagaman sistem pengelolaan pendidikan, dimana sistem pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan daerah lainnya
- f. Adanya kesadaran dari semua pihak (pemerintah, DPRD, masyarakat) bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutam guru tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya
- g. Adanya kesiapan psikologis dari pemerintah pusat dari propinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten/kota

Di samping dampak negatif sebagaimana di uraikan sebelumnya, tentu saja kebijakan desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan adanya dampak positif berikut:

- a. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan terkait daerah dapat di putuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat
- b. Manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetensi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri
- c. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan
- d. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat
- e. Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki
- 2) Efisiensi keuangan hal ini dapat di capai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional
- 3) Efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat
- 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan

Secara strategis kebijakan untuk memajukan pendidikan melalui kebijakan strategis sebagai berikut:

- a. Pelatihan bagi guru di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat
- b. Penguatan fungsi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG)
- c. Peningkatan Kualifikasi guru dari D2 ke S1
- d. Bantuan Beasiswa guru berprestasi dari S1 ke S2
- e. Merencanakan pembangunan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)
- f. Meningkatkan kepedulian masyarakat pada dunia pendidikan secara berkala dan terencana

Selain daripada itu, dapat pula dilakukan strategi lain yang dapat mengarahkan kepada kesejahteraan guru yakni:

- a. Dana pengganti BP3
- b. Uang makan bagi setiap guru sebesar Rp. 15.000,-/hari
- c. Bantuan kendaraan roda dua bagi kepala sekolah dan guru
- d. Bantuan pemberian pakaian seragam bagi guru dan kepala sekolah

Dari deskripsi tentang faktor kekuatan dan kelemahan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan di atas, dan berdasar pada pengalaman implementasi kebijakan tersebut sejak era reformasi, sudah semestinya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap pemegang kebijakan di semua ini pemerintah di Indonesia, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia untuk mencari titik temu antara kedua faktor tersebut sehingga terwujud sinergitas untuk mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan nasional yang ideal dalam kerangka menghasilkan manusia Indonesia yang unggul.

D. Strategi Minimalisasi Politisasi Pelaksanaan Tugas Guru Sebagai Dampak Desentralisasi Pendidikan

Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas diperlukan langkah-langkah strategis yang sejalan dan seirama dengan persoalan-persoalan yang ditemukan yang meliputi sasaran, cara dan sarana, subyek obyek dan metode. Adapaun rumusan strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Strategi

- a. Strategi – 1. Terlaksananya pelatihan-pelatihan secara berkala untuk guru yang mengarahkan kepada profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional
- b. Strategi – 2. Terimplementasinya penguatan fungsi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) yang bertujuan penguatan orientasi pendidikan bukan pada politisasi yang dapat mempengaruhi kinerja guru
- c. Strategi – 3. Terwujudnya guru berstrata 1 dengan cara peningkatan Kualifikasi guru dari D2 ke S1 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru

- d. Strategi – 4. Terwujudnya pemberian bantuan beasiswa guru berprestasi dari S1 ke S2 agar semangat guru mengajar semakin lama semakin tinggi
- e. Strategi – 5. Terwujudnya pembangunan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme guru secara teratur, sistematis dan berkala
- f. Strategi – 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepedulian terhadap dunia pendidikan secara berkala dan terencana agar kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi.
- g. Strategi - 7. Terwujudnya kesejahteraan guru yang meliputi Dana pengganti BP3, Uang makan bagi setiap guru sebesar Rp. 15.000,-/hari, Bantuan kendaraan roda dua bagi kepala sekolah dan guru, dan bantuan pemberian pakaian seragam bagi guru dan kepala sekolah

2. *Upaya*

Upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan pemimpin yang amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya secara konsekwen dan konsisten dan profesional di dalam penyelenggaraan negara perlu ditentukan subyek, obyek dan metoda sebagai berikut:

- a. Subyek
 - 1) Supra struktur, terdiri dari lembaga yang berpengaruh dan mempunyai keterkaitan erat nuansa politis dan peningkatan mutu pendidikan misalnya Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Mapenda, Kementerian Agama, komite sekolah, organisasi sekolah dan LPTK serta organisasi profesi keguruan yang berhubungan erat dengan peningkatan pendidikan dan guru
 - 2) Infra struktur, terdiri dari organisasi masyarakat (ormas)/organisasi politik (orpol), LSM, perguruan tinggi dan semua lembaga pemerintah non departemen yang memiliki pengaruh luas terhadap pengembangan

kualitas dan kesejahteraan guru sebagai dampak desentralisasi pendidikan

- 3) Sub struktur, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama serta komponen masyarakat lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap proses perumusan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan dan pengembangan tugas guru di era desentralisasi

b. Obyek

Obyek adalah para guru yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai pendidik yang harus memiliki kompetensi meliputi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial sehingga dapat dikatakan guru profesional dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan nasional untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan. Adapun obyek dalam konteks ini antara lain:

- 1) **Aparat pemerintah.** Seluruh aparat pemerintah diseluruh strata penyelenggaraan negara disetiap tingkatan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif
- 2) **Pengusaha.** Seluruh pimpinan badan usaha yang berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau sebagai pimpinan perusahaan yang dalam operasinya terkait dengan program-program penyelenggaraan pendidikan secara nasional
- 3) **LSM.** Lembaga sosial masyarakat *non governance* yang dapat melepaskan aspirasinya tanpa dibatasi oleh rambu-rambu negara sendiri maupun negara lain untuk memberikan sumbangsih positif terhadap pengembangan pendidikan nasional
- 4) **Masyarakat.** Seluruh lapisan masyarakat dari semua tingkatan, muda maupun tua berstatus pelajar atau pegawai maupun swasta yang dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun sebagai pengawas yang dapat mengeluarkan aspirasinya dan

memberikan penilaian kepada pemerintah yang meliputi tokoh politik, partai, masyarakat, agama, pemuda dan organisasi kemasyarakatan

- 5) **Lembaga pendidikan.** Lembaga pendidikan dari tingkat terendah sampai perguruan tinggi serta lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi tertentu baik dilingkungan pemerintah maupun swasta
- 6) **Peraturan perundangan.** Peraturan dan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan
- 7) **Mass media.** Seluruh Mass media dan kantor berita yang dapat menyiarkan pemberitaan yang positif maupun negatif sehingga dapat membentuk opini publik

3. *Metode*

Metode yang digunakan dalam rangka melaksanakan strategi dalam meminimalisasi nuansa politisasi dalam pelaksanaan tugas guru sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan sebagai berikut:

- a. Edukasi, yaitu pemberian kesempatan kepada guru untuk menimba ilmu dan meluaskan wawasan serta keterampilan melalui program pendidikan dan latihan, sehingga memiliki ilmu, wawasan dan keterampilan dalam mengajar dan berkompetensi keguruan
- b. Sosialisasi, yaitu aktifitas yang bergerak dalam menanamkan urgensi profesionalisme guru dan ciri-ciri guru profesional serta kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dalam menentukan arah pendidikan, terutama sekolah yang dipimpinnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terjadwal secara integral dan berkesimbangan, antara lain, seminar, dialog, penyuluhan, mass media, dan lain-lain
- c. Koordinasi dan Kerjasama, yaitu kegiatan saling tukar informasi melalui kerjasama antar lembaga, antar pejabat,

- antar tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memberikan masukan, saran dan kritik sehingga dapat dilakukan evaluasi bagi peningkatan kualitas profesionalisme guru dan memiliki kemampuan akademik yang sangat baik
- d. Keteladanan, yaitu serangkaian sikap, sifat dan perilaku yang ditunjukkan oleh guru sebagai sentral figur dan leading sektor bagi siswa-siswa, baik dalam berucap maupun dalam bertindak, berakhlak mulia serta hidup sederhana dan bersahaja dengan cara menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang dipercaya, jujur, adil dan bijaksana, dan berakhlak mulia, sehingga rakyat bangga kepadanya dan akan meneladaninya dan siap bersama para pemimpin untuk membela dan berkorban untuk negara
 - e. Regulasi/Deregulasi, yaitu pembuatan dan penyempurnaan perangkat dan materi perundang-undangan yang berkaitan dengan keguruan dari undang-undang tertinggi sampai dengan kebijakan daerah, baik secara teoritis sampai implementasi yang kondusif dan aspiratif dalam rangka pembangunan pendidikan nasional



Dari kerangka pikir di atas dapat dilihat dengan jelas, peran guru sangat signifikan dan mendukung semua elemen yang terkait semua aspek yang mengelilingi nuansa politisasi di sekitar guru. Maka guru dalam melaksanakan tugas belajar mengajar hendaknya berpegang pada prinsip mendidik yang antara lain : perhatian, penyuluhan, pengorbanan, dan peneguhan yang bermuara pada keteladanan. Menyadari dari prinsip tersebut, seorang guru dalam menjalankan tugasnya tidak hanya pengajar, tetapi seorang guru harus betul-betul profesional dalam melihat, menganalisa, mengevaluasi, serta mampu memberikan bantuan pada siswa untuk memecahkan masalahnya.

Selaras dengan apa yang dikatakan Bobby Deporter dalam bukunya *Quantum Learning* bahwa agar efektif belajar dapat dan harus menyenangkan. Untuk menyenangkan suatu mata pelajaran yang diajarkan, guru dituntut kreatif menciptakan situasi yang inovatif dengan mengerahkan secara optimal sumber daya cipta, karya maupun karsanya dalam mengajar dan sumber dana yang ada untuk diolah sedemikian optimalnya agar benar-benar menghasilkan hasil yang memuaskan baik bagi peserta didik maupun guru yang bersangkutan tentunya. Guru yang berada di barisan terdepan dalam pendidikan harus bisa meramu agar penyampaian materi menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

E. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desentralisasi pendidikan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam sistem pendidikan nasional. Karena itu, pengaturan pendidikan rentan dengan kebijakan politis yang dimainkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki otoritas sangat dominan dalam menentukan arah pendidikan termasuk tugas guru. Sebagai pendidik seyogyanya guru harus memiliki kompetensi meliputi profesional, peadagogik, kepribadian, dan sosial sehingga dapat dikatakan guru

profesional. Karena itu, jangan sampai kecenderungan nuansa politisasi jangan sampai mengganggu tugas guru profesional, untuk itu diperlukan strategi-strategi yang mengarah peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

2. Untuk menjamin martabat guru sebagai profesi, kiranya perlu dikawal sejak proses sertifikasi sampai pada unjuk kinerja profesionalnya.
3. Guru adalah seorang atau mereka yang pekerjaannya khusus menyampaikan (mengajarkan) materi pelajaran kepada siswa disekolah. Peran guru dalam proses belajar-mengajar , guru tidak hanya tampil lagi sebagai pengajar (*teacher*), seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih, pembimbing, dan manager belajar, juga yang lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi dari peran guru masa depan. Di mana sebagai pelatih, seorang guru akan berperan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya.
4. Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi dapat menciptakan ketidaksetaraan antar sekolah dan antar daerah. Pada tingkat lokal desentralisasi dapat melahirkan banyak pilihan bagi sekolah dan orang tua, memperbanyak ragam sumber pendanaan, dan memperbesar akses terhadap informasi sehingga pada gilirannya akan dapat melahirkan beragam metode, kriteria, pilihan-pilihan
5. Terlepas dari sikap keberpihakan kalangan guru pegawai negeri terhadap masalah kebijakan tambang, atau pun pada

sikap loyalitasnya kepada pemerintah dan rasa solidaritas terhadap sesama guru pegawai negeri yang rumahnya menjadi sasaran korban dari amuk massa ketika berunjuk rasa menolak tambang. Tetapi pada posisi profesi guru yang kerap dipolitisasi serta netralitasnya sebagai pelayan masyarakat di bidang pendidikan. Masalah netralitas dan profesionalisme guru menjadi perhatian utama karena di tangan guru salah satu pemegang kunci kualitas pendidikan ditentukan.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, Armida S. 2000. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Bahri, Djamarah Syaiful. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Istana Ilmi. 2012. <http://istanailmu.com/archives-2011/desentralisasi-pendidikan/html>,
- Nasution, S. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, Ngalm. 1994. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Budi. 2012. <http://budisansblog.blogspot.com/2012/01/antara-resentralisasi-dan.html>,
- Sirozi, M. 2010. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suara NTB. *Sosial Detil* dalam: <http://www.suarantb.com/2012/01/13/Sosial/detil5%201.html>,
- Syah, Muhibbin. 1995. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uno, Hamzah B. 2008. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yoyon, Bahtiar Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.